

PEREMPUAN PADA SEKTOR EKONOMI UNGGULAN

Rika Harini¹

Abstract

The economically superior sectors are sectors with good prospect and they contribute to the local development. In other words, the sectors are those that win the competition with other sectors as clearly observed in its contribution to local income. This study aims to investigate the economically superior sectors and the participations level and the working productivity in Yogyakarta Special Regency. The study conducted by analyzing the secondary (time series) data obtained from Susenas and Sakernas. The descriptive analysis is using table and maping through model LQ (Location Quotient). The result shows that Sleman has 6 economically superior sectors while Gunung Kidul only has 3. A high participation level of women in the economically superior sectors is found in trading, hotel and restaurant sectors while the lowest participation level is found in mining sector (less than 1%).

Keywords: superior sectors, participation level, working productivity

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak terhadap daerah untuk secara mandiri mengelola sumber daya yang dimiliki. Optimalisasi terhadap pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sangat diperlukan dalam rangka peningkatan perekonomian suatu daerah. Potensi sumber daya alam maupun manusia antardaerah berbeda-beda. Melalui model LQ (*Location Quotient*), suatu kebijakan dalam pembangunan daerah terutama pada penekanan skala prioritas pengembangan sector ekonomi yang diunggulkan dapat ditentukan. Dengan demikian, suatu daerah dapat lebih mengoptimalkan pengembangan suatu sector perekonomian tertentu sebagai pendukung utama perekonomian daerah yang didukung oleh sektor-sektor ekonomi lain yang belum atau tidak menjadi unggulan.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat

terhadap pemanfaatan atau penyerapan tenaga kerja pada sector ekonomi unggulan sangat diperlukan. Tingkat partisipasi masyarakat diharapkan tidak bias gender, yaitu tersedianya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan pada semua sector perekonomian yang ada. Masalah ekonomi terutama pada bidang tenaga kerja perempuan dalam kerangka pembangunan berperspektif gender merupakan isu yang paling sering dibicarakan. Kondisi ini terjadi karena jumlah perempuan yang berpartisipasi di pasar kerja selalu berada jauh di bawah kaum laki-laki. Tujuh puluh persen perempuan bekerja hanya terkonsentrasi pada 25 lapangan kerja, sedangkan kaum laki-laki dapat terserap pada kurang lebih 300 lapangan kerja (Suratiyah, 1997). Menurut Haris (1997), terdapat 3 faktor utama yang memengaruhi masuknya perempuan ke pasar kerja: (1) struktur dan fungsi keluarga meliputi jaringan kerja, status sosial, dan karakteristik demografi;

¹ Staf pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

(2) karakteristik individual, yaitu pendidikan, umur, dan status kawin; serta (3) lingkungan sosial budaya meliputi wilayah, situasi politik, dan pasar kerja.

Keterlibatan perempuan di pasar kerja pada berbagai sektor perekonomian akan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lain (perdesaan dan perkotaan). Hal tersebut tergantung dari kondisi sosial ekonomi, budaya, dan fisik wilayah, serta kebijakan pemerintah setempat. Menurut Megawangi (1999), budaya merupakan faktor utama yang menyebabkan sedikitnya perempuan yang masuk ke pasar kerja selain faktor ekonomi, sosial, dan biologis. Berbagai hasil penelitian menunjukkan di wilayah perdesaan tingkat partisipasi angkatan kerja justru lebih tinggi yang terjadi terutama akibat tekanan ekonomi. Akan tetapi, hal itu akan berbeda jika dirinci pada lapangan kerja pada setiap sektor perekonomian.

Seiring perkembangan zaman serta perkembangan pengetahuan dan teknologi ternyata partisipasi perempuan di pasar kerja juga terus mengalami peningkatan. Tahun 1980 TPAK perempuan yang sebesar 32,4 persen meningkat menjadi 38,8 persen tahun 1990 dan naik lagi tahun 2000 menjadi 42,3 persen. Sistem sosial budaya yang semakin terbuka, tingkat pendidikan perempuan yang terus meningkat, dan kebijakan pemerintah yang mulai memperhatikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada berbagai bidang kehidupan menyebabkan semakin tingginya partisipasi perempuan di sektor ekonomi. Namun demikian, apakah peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja tersebut telah merata pada kesembilan sektor perekonomian? Apakah peningkatan partisipasi perempuan telah tampak pada sektor ekonomi yang diunggulkan oleh suatu daerah atau partisipasi perempuan hanya terdapat pada sektor perekonomian yang bersifat marginal dengan tingkat upah yang rendah?

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. mengidentifikasi sektor apa saja yang menjadi unggulan tiap daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi dan produktivitas kerja perempuan pada sektor ekonomi unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sektor Ekonomi Unggulan

Indikator keberhasilan atau kesuksesan suatu daerah secara langsung dapat dilihat melalui tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan daerah bersumber dari berbagai sektor perekonomian, yang berdasarkan jenis lapangan pekerjaan terdiri dari 9 sektor berikut. (1) Pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel, dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa. Tiap-tiap sektor ekonomi tersebut memiliki tingkat keunggulan yang berbeda untuk setiap daerah. Sektor unggulan yang dimaksud di sini adalah sektor perekonomian yang berprospek sebagai pendukung perekonomian daerah. Keberadaan sektor unggulan pada suatu daerah berimplikasi terhadap adanya dukungan sumber daya manusia yang melimpah dan berkualitas (Arsyad, 1999). Sektor ekonomi unggulan pada dasarnya bersifat dinamis, dipilih sesuai dengan potensi untuk meningkatkan pendapatan, dan berbasis utama pada sumber daya domestik yang ada.

Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan sektor ekonomi unggulan adalah LQ (*Location Quotient*), yaitu dengan mengukur kegiatan ekonomi secara relatif berdasarkan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan. Sektor unggulan akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar daerah maupun luar daerah, sehingga akan meningkatkan konsumsi dan investasi daerah tersebut. Pada akhirnya hal itu akan menaikkan pendapatan dan membuka kesempatan kerja yang secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harini, dkk. (2004) menunjukkan terdapat perbedaan sektor ekonomi unggulan antardaerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor primer

(pertanian) menjadi sektor unggulan pada 3 kabupaten, yaitu Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, sedangkan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman adalah sektor sekunder (industri).

Sektor ekonomi yang menjadi unggulan pada suatu daerah perlu mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan yang ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah tenaga kerja yang tersedia melimpah, tetapi kesempatan kerja pada sektor unggulan hanya sedikit karena yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang berkualitas. Pada kenyataannya angkatan kerja yang berpendidikan rendah masih cukup banyak sehingga kekurangan tenaga kerja pada sektor unggulan tersebut diperoleh dari daerah lain, yang berarti penyerapan kesempatan kerja pada sektor tersebut rendah. Secara makro permintaan tenaga kerja dapat diperkirakan dengan mengetahui laju pertumbuhan dan daya serap tiap-tiap sektor ekonomi. Elastisitas kesempatan kerja dapat digunakan untuk menyusun perkiraan tenaga kerja dan menyusun kebijakan pembangunan untuk ketenagakerjaan (Simanjuntak, 1995).

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu dikembangkan kebijakan nasional yang responsif gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang ditunjukkan dengan masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui strategi pengarusutamaan gender. Dengan adanya program tersebut, diharapkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses sumber pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan, serta memiliki kontrol dan manfaat yang sama dalam sumber daya dan hasil pembangunan (anonim, 2004).

Ketimpangan gender sudah menjadi bahasa baku yang selalu dikaitkan dengan kondisi perempuan yang terpuruk, tertinggal, ter subordinasi, dan istilah lain yang sejenis. Hal

itu karena perempuan merupakan sumber daya manusia dalam jumlah yang besar, tetapi jumlah perempuan yang masuk di sektor publik (ketenagakerjaan) selalu di bawah laki-laki. Yang menjadi agenda feminis *mainstream* adalah selalu berusaha mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu laki-laki dan perempuan harus sama-sama (50/50) berperan, baik di luar (publik) maupun di dalam rumah (domestik). Gerakan feminisme yang berkembang selama ini didasari suatu kenyataan bahwa perempuan telah mendapatkan perlakuan berbeda dalam segenap aspek kehidupan, yakni ekonomi, politik, ideologi, dan agama (Opong dan Katherine, 1997). Kaum feminis menghendaki terciptanya tatanan dunia secara keseluruhan yang adil dan bebas dari penindasan terhadap sesama, terutama terhadap kaum perempuan yang selama ini menjadi korban.

Aspek yang dipersoalkan kaum feminis adalah mengapa perbedaan biologis (seks) harus melahirkan perbedaan dan ketidakadilan gender. Masyarakatlah yang menciptakan konstruksi sosial yang membedakan watak, kejiwaan maupun hak dan kewajiban sosial (Dwiyanto dan Darwin, 1996). Sejak 1990 UNDP (*United Nation Development Program*) menandakan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya ukuran GDP (*Gross Domestic Product*), tetapi juga dari *Human Development Index* (HDI). Pengenalan konsep HDI yang melalui pengukuran tiga aspek, yaitu usia harapan hidup (*life expectancy*), angka kematian bayi (*infant mortality rate*), dan kecukupan pangan (*food security*), telah memberikan pengaruh besar dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai negara.

Faktor kesetaraan gender harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional dengan perhitungan GDI (*Gender Development Index*), yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta GEM (*Gender Empowerment Measure*) yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan dalam beberapa sektor lainnya dengan konsep sama rata. Kenyataannya, data

statistik selalu menunjukkan angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja selalu lebih rendah daripada laki-laki. Kesetaraan gender dengan ukuran kuantitatif telah menjadi arus topik utama dalam segala macam diskursus tentang kedudukan perempuan. Ukuran kuantitatif yang dimaksud adalah *outcome/* luaran yang dicapai oleh kaum perempuan relatif terhadap laki-laki.

Konsep kesetaraan gender adalah bagian integral dari usaha mewujudkan masyarakat setara 50/50. Salah satu usahanya adalah melakukan transformasi sosial agar struktur masyarakat menjadi simpel, yaitu (1) tidak ada stratifikasi dalam masyarakat, (2) tidak ada keseragaman dalam sifat kemampuan dan keinginan manusia setiap individu mempunyai utilitas yang sama, dan (3) segala alokasi sumber daya harus seragam.

Perempuan dalam Dunia Kerja

Masuknya perempuan pada sektor publik sampai saat ini masih menjadi sorotan masyarakat. Terdapat dua pandangan tentang perempuan yang bekerja. *Pertama*, apakah mereka ini adalah sekelompok perempuan yang menemukan peluang baru dan pantas mendapat penghormatan atau menurut pandangan *kedua*, mereka ini merupakan sekelompok perempuan yang mengingkari kodrat dan pantas dicerca (Magar, 2003). Persepsi masyarakat tradisional sampai saat ini beranggapan fungsi perempuan sebatas dalam rumah tangga atau sektor domestik. Sektor publik atau pekerjaan di luar rumah menjadi tanggung jawab laki-laki dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini tidak terlepas atas label yang disandang perempuan sebagai kaum yang lemah, tidak mempunyai kemampuan bersaing, dan emosional, yang menyebabkan posisi perempuan adalah di rumah.

Seperti diketahui, ada empat faktor yang memengaruhi dan memotivasi perempuan untuk bekerja, yaitu pengembangan profesi, perubahan teknostruktur, tekanan ekonomi, dan nilai budaya. Pada umumnya keadaan ekonomi menjadi pendorong utama bagi seorang perempuan untuk bekerja, baik yang dilakukan

di rumah maupun yang dilakukan di luar rumah dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Di lain pihak Susantiono (2003) mengemukakan beberapa motivasi yang mendorong perempuan untuk berkarier sebagai berikut. *Pertama*, adanya alasan ekonomi, yaitu kecenderungan perempuan ingin mandiri atau setidaknya membantu meringankan beban keluarga jika suami berpenghasilan kecil. Atau istri mempunyai kelebihan tertentu sehingga waktunya lebih efisien jika digunakan untuk mencari nafkah. *Kedua*, motif intrinsik (yang datang dari dalam dirinya), yaitu untuk menunjukkan eksistensinya sebagai manusia yang mampu berprestasi dan mampu hidup mandiri dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga*, memperluas wawasan dan cakrawala, termasuk juga yang hanya mengisi kesibukan dan membunuh kesepian karena suami sibuk dengan tugasnya.

Penemuan teknologi modern seperti alat kontrasepsi dapat mengubah *division of labor* ini. Perempuan dapat mengatur jumlah anak yang dilahirkan sehingga waktu yang dimiliki tidak habis tersita untuk urusan pengasuhan anak. Semua ini akan menghilangkan kendala biologis yang menghambat mereka berkiper di sektor-sektor yang tadinya didominasi oleh laki-laki. Beberapa bukti antropologis menunjukkan perempuan dapat mempunyai peran seperti laki-laki dan ini dapat terwujud kalau tradisi budaya memang mendukung konsep gender yang demikian. Oleh karenanya, mengubah institusi budaya adalah agenda penting bagi para feminis egalitis agar kesetaraan gender dapat dicapai. Isu transformasi sosial di Indonesia menunjukkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan terjadi karena proses konstruksi sosial.

Selain itu, kemajuan pendidikan juga akan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan perempuan. Menurut Widiyati (1996), pendidikan perempuan akan memberikan kesempatan baru kepada mereka untuk memasuki pasar kerja di samping pengaruhnya terhadap norma sosial, seperti penundaan usia kawin. Penundaan usia kawin merupakan respons keinginan perempuan untuk mengaktualisasikan diri karena memasuki

gerbang pernikahan sedikit mengganggu peran kemampuan perempuan di sektor publik dengan adanya peran gandanya di sektor domestik.

Peningkatan partisipasi perempuan di sektor perekonomian disebabkan oleh meningkatnya pendidikan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka buta huruf perempuan dari tahun ke tahun. Pada 1970 jumlah perempuan yang berusia 10 tahun ke atas dan buta huruf sebanyak 53,1 persen. Sepuluh tahun kemudian menurun menjadi 21,3 persen, hingga pada 1995 jumlah perempuan yang buta huruf tinggal 9 persen. Keadaan tersebut menggambarkan semakin membaiknya kesempatan perempuan memperoleh pendidikan. BPS (2002) menunjukkan jumlah perempuan yang tamat SMU juga mengalami peningkatan tahun 2000, yaitu 41,56 persen meningkat menjadi 44,76 persen tahun 2002 untuk daerah perkotaan. Demikian juga yang terjadi di daerah perdesaan, jika tahun 2000 sebesar 35,4 persen perempuan berpendidikan sampai tamat SMU, maka tahun 2002 meningkat menjadi 35,52 persen. Kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah provinsi di Indonesia, termasuk yang sangat besar peningkatannya adalah di Provinsi D. I. Yogyakarta, yaitu sebesar 25 persen dalam kurun waktu 10 tahun dari 1990 sampai dengan 2000.

Kemajuan di bidang pendidikan dan pengetahuan berdampak pada pasar kerja perempuan, baik di desa maupun di kota. Pada 1997 TPAK perempuan sebesar 46,6 persen dan naik menjadi 48,2 persen tahun 2000 untuk wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah perdesaan TPAK perempuan justru lebih tinggi, yaitu tahun 1997 sebesar 63,7 persen meningkat menjadi 65,9 persen tahun 2000. Demikian juga hasil penelitian Harini, dkk. (2005) yang menunjukkan angka partisipasi sekolah untuk penduduk perempuan pada tingkat pendidikan dasar mencapai 95 persen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan laju peningkatan TPAK laki-laki, TPAK perempuan masih lebih rendah, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Sektor

perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan merupakan perpanjangan tangan dari sektor domestik, seperti guru, perawat, pramuniaga, dan sekretaris. Jenis pekerjaan tersebut banyak memerlukan keahlian manual. Hasil penelitian Ferree (2003) di Amerika menunjukkan dari sekian banyak perempuan yang masuk ke pasar kerja, sekitar 96 persennya adalah sebagai perawat dan 84 persen sebagai guru. Jumlah pekerja perempuan di kedua bidang tersebut terus meningkat seiring dengan perkembangan waktu walaupun di sektor perekonomian yang lain, peran perempuan juga cenderung meningkat, tetapi jauh lebih rendah. Hasil penelitian Harsiwi (2004) pada perempuan yang masuk pasar kerja terutama di sektor formal (dosen) menunjukkan produktivitas dan kesempatan kerja tidak berbeda dengan pekerjaan laki-laki. Hal tersebut tertuang dalam suatu aturan kepegawaian yang tidak bersifat diskriminatif yang nantinya akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja dosen perempuan. Produktivitas tersebut tergantung dari kondisi kemampuan, baik secara akademik maupun nonakademik, dalam hal ini perempuan yang sudah berumah tangga tidak menjadi penghalang dalam peningkatan produktivitas kerja.

Semakin banyaknya studi yang membahas mengenai ketidakadilan gender membuat posisi perempuan di sektor publik semakin terangkat. Hal tersebut terjadi di berbagai belahan dunia, seperti halnya di Cuba. Adanya perkembangan penelitian dan pengetahuan tentang gender dari tahun 1974-2000 ternyata berkorelasi positif terhadap kesetaraan gender pada wilayah tersebut, terutama pada sektor perekonomian. Adanya metode pendekatan penelitian yang terus dikembangkan dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah berakibat peningkatan peran perempuan.

Berdasarkan uraian dan landasan teoretis tersebut, dalam penelitian ini secara *purposive sampling* ditentukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah penelitian. Dasar pertimbangannya adalah adanya variasi antarkabupaten dan kota kemungkinan akan

menyebabkan perbedaan potensi daerah, yaitu perbedaan sektor ekonomi unggulan maupun tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja. Data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah data PDRB harga konstan secara *time series* (1995-2004) dan data ketenagakerjaan menggunakan data Susenas dan Sakernas.

Analisis hasil penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan program Excell dan SPSS. Adapun penyajian hasil dengan menggunakan tabel, grafik, dan peta. Berdasarkan tujuan penelitian yang pertama, yaitu untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan, digunakan metode *Location Quotient* (Glasson, 1987), dengan persamaan:

$$LQ = \frac{Y_{ij} / Y_j}{Y_i / Y}$$

Keterangan:

Y_{ij} = PDRB dari sektor perekonomian i pada kabupaten/kota j

Y_j = PDRB kabupaten/kota j

Y_i = PDRB provinsi dari sektor i

Y = PDRB provinsi

Jika $LQ > 1$, berarti sektor ekonomi pada daerah yang bersangkutan merupakan sektor unggulan.

Jika $LQ < 1$, berarti sektor ekonomi pada daerah yang bersangkutan bukan merupakan sektor unggulan.

Pada tujuan yang kedua, yaitu untuk mengetahui tingkat partisipasi dan produktivitas kerja perempuan pada sektor ekonomi unggulan di Provinsi D. I. Yogyakarta, dilihat dari rata-rata penyerapan tenaga kerja perempuan antara tahun 1995 dan 2004. Kemudian nilainya dibandingkan apakah terjadi peningkatan atau penurunan tingkat partisipasi.

- Rata-rata penyerapan tenaga kerja (Simanjuntak, 1995)

$$\Delta TK_{ij} = \frac{E^*_{ij}}{E_{ij}} \times 100\%$$

DTK_{ij} = perubahan penyerapan tenaga kerja perempuan sektor i

E^*_{ij} = penyerapan tenaga kerja perempuan sektor i pada tahun akhir

E_{ij} = penyerapan tenaga kerja perempuan sektor i pada tahun awal

- Uji produktivitas penyerapan tenaga kerja

$$P = Q/L$$

P = Produktivitas tenaga kerja

Q = Produktivitas PDRB

L = Penyerapan tenaga kerja

- Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja

$$E = \% \Delta n / \% \Delta g$$

E = Elastisitas penyerapan tenaga kerja

$\% \Delta n$ = Perubahan penyerapan tenaga kerja

$\% \Delta g$ = Perubahan PDRB

Sektor Ekonomi Unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

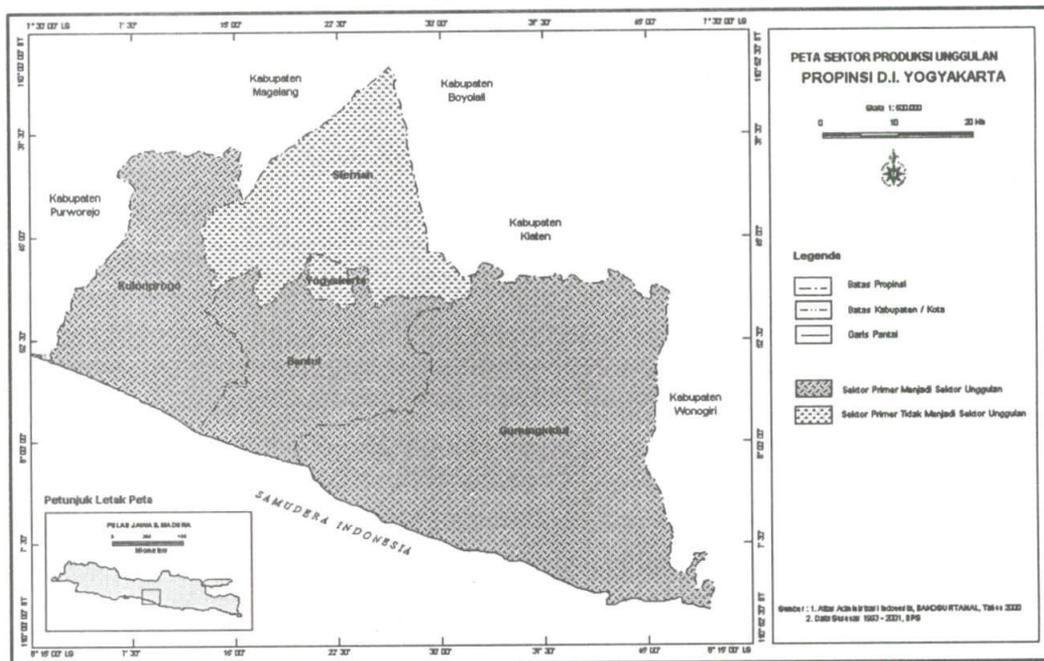
Metode *Location Quotient* digunakan untuk menentukan keunggulan sektor perekonomian yang didasarkan pada jenis lapangan usaha, yaitu dari data PDRB harga konstan antara tahun 1995-2004. Selain itu, dengan metode ini perkembangan perekonomian selama 10 tahun di setiap daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan besarnya sumbangan setiap sektor perekonomian terhadap pendapatan daerah juga dapat diketahui. Sektor ekonomi unggulan di tiap daerah dapat saja berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, pada tahun pertama di suatu daerah ada 4 sektor unggulan, tahun kedua dan selanjutnya dapat menjadi sama, kurang, atau lebih jumlah sektor yang menjadi unggulan. Gambar 1 dan Tabel 1 secara jelas menunjukkan hasil perhitungan nilai LQ untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdapat 5 sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Kota Yogyakarta, yaitu sektor listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;

Tabel 1
Nilai LQ (Location Quotient) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Lapangan usaha	Tahun									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Kota Yogyakarta										
• Pertanian	0,08	0,072	0,07	0,065	0,057	0,051	0,045	0,042	0,04	0,03
• Pertambangan dan galian	0,34	0,343	0,34	0,339	0,344	0,445	0,307	0,311	0,3	0,29
• Industri pengolahan	0,82	0,8	0,8	0,838	0,939	0,897	0,821	0,824	0,81	0,79
• Listrik, gas, dan air bersih	2,09	2,17	2,06	1,843	1,919	1,856	1,548	1,609	1,58	1,52
• Bangunan	0,88	0,863	0,87	0,728	0,757	0,849	0,818	0,877	0,87	0,88
• Perdagangan, hotel, dan restoran	1,29	1,275	1,31	1,251	1,074	1,221	1,17	1,221	1,33	1,32
• Pengangkutan dan komunikasi	1,38	1,363	1,37	1,43	1,462	1,884	1,833	1,892	1,85	1,9
• Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	1,77	1,744	1,78	1,672	1,706	1,703	1,624	1,653	1,61	1,54
• Jasa-jasa	1,33	1,341	1,27	1,36	1,395	1,85	1,327	1,353	1,29	1,26
Kabupaten Sleman										
• Pertanian	1,07	1,049	1,01	0,892	0,85	1,009	0,968	0,984	0,93	0,94
• Pertambangan dan galian	0,06	0,063	0,07	0,056	0,068	0,059	0,065	0,077	0,11	0,13
• Industri pengolahan	1,29	1,27	1,21	1,225	1,349	1,171	1,491	1,238	1,1	1,11
• Listrik, gas, dan air bersih	0,81	0,858	0,93	1,008	1,046	1,169	0,983	1,003	0,97	0,94
• Bangunan	1,23	1,226	1,22	1,291	1,349	1,219	1,165	1,165	1,23	1,23
• Perdagangan, hotel, dan restoran	1,13	1,106	1,12	1,169	1,004	1,058	1,008	1,017	1,14	1,12
• Pengangkutan dan komunikasi	0,99	0,974	0,97	0,99	0,995	0,647	0,619	0,625	0,61	0,58
• Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	1,24	1,194	1,16	1,239	1,256	1,155	1,108	1,12	1,12	1,14
• Jasa-jasa	0,9	0,897	0,91	0,916	0,933	1,122	1,075	1,085	1,06	1,05
Kabupaten Kulon Progo										
• Pertanian	1,6	1,663	1,7	1,85	1,319	1,057	1,05	1,107	1,67	1,69
• Pertambangan dan galian	0,14	0,154	0,13	0,131	0,114	0,119	0,153	0,195	0,33	0,34
• Industri pengolahan	1,5	1,408	1,46	1,296	0,233	0,203	0,272	0,212	1,23	1,2
• Listrik, gas, dan air bersih	0,49	0,496	0,55	0,595	0,621	0,674	0,554	0,519	0,78	0,75
• Bangunan	0,9	0,902	0,86	0,938	0,583	0,751	0,628	0,661	0,68	0,66
• Perdagangan, hotel, dan restoran	0,87	0,879	0,98	0,966	1,233	1,097	1,006	1,053	1,26	1,25
• Pengangkutan dan komunikasi	0,84	0,865	0,84	0,841	0,777	1,014	0,947	0,97	1,21	1,2
• Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	0,57	0,543	0,54	0,607	0,543	0,25	0,586	0,589	0,71	0,76
• Jasa-jasa	1,13	1,059	1,09	1,017	0,76	0,956	0,904	0,931	1,18	1,19
Kabupaten Bantul										
• Pertanian	1,53	1,515	1,49	1,545	1,379	1,426	1,660	1,404	1,32	1,33
• Pertambangan dan galian	0,14	0,163	0,18	0,154	0,183	0,18	0,257	0,264	0,35	0,35
• Industri pengolahan	1,02	1,051	1,07	1,096	1,267	1,445	0,227	1,368	1,33	1,33
• Listrik, gas, dan air bersih	0,96	0,637	0,58	0,787	0,693	0,254	1,017	0,847	0,89	0,97
• Bangunan	1,2	1,186	1,17	1,235	1,306	1,209	1,39	1,148	1,1	1,08
• Perdagangan, hotel, dan restoran	1,09	1,064	1,03	1,037	0,905	0,916	1,089	0,917	0,98	0,99
• Pengangkutan dan komunikasi	0,91	0,886	0,88	0,77	0,781	0,813	0,932	0,781	0,74	0,7
• Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	0,62	0,628	0,62	0,658	0,676	0,63	0,734	0,644	0,67	0,68
• Jasa-jasa	1,09	1,056	1,07	1,039	1,061	0,761	0,895	0,767	0,76	0,77
Kabupaten Gunung Kidul										
• Pertanian	2,03	2,009	1,96	2,107	2,398	2,271	2,178	2,256	2,13	2,1
• Pertambangan dan galian	0,21	0,238	0,26	0,264	0,291	0,414	0,451	0,54	0,67	0,72
• Industri pengolahan	0,99	1,01	1,01	1,014	1,014	0,832	1,047	0,791	0,78	0,78
• Listrik, gas, dan air bersih	0,35	0,339	0,41	0,412	0,346	0,569	0,5	0,51	0,49	0,55
• Bangunan	1,17	1,137	1,12	1,132	1,058	1,10	1,09	1,24	1,07	1,01
• Perdagangan, hotel, dan restoran	0,78	0,779	0,76	0,769	0,589	0,693	0,661	0,684	0,74	0,75
• Pengangkutan dan komunikasi	1,08	1,047	1,02	1,009	1,02	1,01	1,09	1,07	1,11	1,03
• Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	0,47	0,472	0,46	0,424	0,392	0,42	0,411	0,443	0,47	0,49
• Jasa-jasa	0,95	0,928	0,97	0,885	0,821	0,754	0,718	0,766	0,77	0,8

Gambar 1
Peta Sektor Ekonomi Unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



serta sektor jasa-jasa. Jika dilihat proporsi sumbangan terhadap pendapatan daerah, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor pengangkutan komunikasi mengalami kecenderungan peningkatan. Sedangkan pada sektor listrik, gas, dan air bersih; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa, proporsinya semakin kecil.

Sektor pertanian di Kabupaten Sleman antara tahun 1995-2000 masih merupakan sektor unggulan. Akan tetapi, setelah tahun 2001 sektor ini mempunyai kecenderungan menurun proporsi sumbangannya terhadap pendapatan daerah, yang terlihat dari nilai LQ yang kurang dari 1. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terjadi karena adanya alih fungsi lahan pertanian yang tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (paling tinggi di Kabupaten Sleman). Sebaliknya, untuk sektor bangunan memiliki kecenderungan nilai LQ yang semakin tinggi. Sektor ini menjadi sektor unggulan seiring dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian, yang secara langsung dapat membuktikan adanya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman terjadi secara signifikan. Sektor ekonomi lain yang menjadi unggulan di Kabupaten Sleman adalah sektor industri pengolahan; perdagangan, hotel, dan restoran; keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Hasil perhitungan LQ di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan terdapat 6 sektor perekonomian yang memiliki kecenderungan peningkatan proporsi sumbangan PDRB. Hal ini berarti peran berbagai sektor perekonomian untuk pembangunan daerah cukup tinggi. Pembangunan dan pertumbuhan yang baik pada suatu daerah tidak hanya tergantung pada satu atau dua sektor perekonomian, tetapi jika semua sektor perekonomian saling mendukung, perkembangan daerah tersebut juga akan baik dan akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan Kabupaten Sleman yang sektor pertanian terus mengalami penurunan proporsi, di Kabupaten Kulon Progo sektor ini justru mengalami peningkatan. Sektor perekonomian yang menjadi unggulan adalah sektor pertanian; industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor jasa-jasa. Dari 5 sektor ekonomi yang menjadi unggulan, sektor pertanian memiliki nilai LQ paling tinggi (1,60), sedangkan yang paling rendah adalah sektor jasa dengan nilai LQ sebesar 1,19 (Tabel 1).

Seperti halnya di Kabupaten Kulon Progo, sektor pertanian di Kabupaten Bantul memiliki

nilai LQ paling tinggi walaupun jika dilihat proporsi perkembangan setiap tahunnya, sektor ini cenderung menurun. Terdapat 5 sektor ekonomi yang pernah menjadi unggulan, yaitu sektor pertanian; industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Akan tetapi, yang tetap unggul antara tahun 1995-2004 hanya 3 sektor, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor bangunan. Sektor pertambangan dan galian; listrik, gas, dan air bersih; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta pengangkutan dan komunikasi belum pernah menjadi unggulan di Kabupaten Bantul. Akan tetapi, dari keempat sektor perekonomian tersebut, hanya sektor pengangkutan dan komunikasi yang menunjukkan proporsi penurunan sumbangan PDRB dari tahun ke tahun. Sektor-sektor perekonomian yang belum menjadi unggulan seiring dengan perkembangan waktu sebenarnya dapat menjadi sektor unggulan. Kondisi tersebut dapat terjadi jika perekonomian dikelola dengan baik. Peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan, masyarakat sebagai pelaku, dan sektor swasta sebagai pendukung harus bekerja secara maksimal dan bersama-sama untuk peningkatan pembangunan di setiap sektor perekonomian.

Sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Kabupaten Gunung Kidul jumlahnya paling sedikit, yaitu hanya 3 sektor yang meliputi sektor pertanian; bangunan; pengangkutan dan komunikasi. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi unggulan yang memiliki nilai LQ paling tinggi (lebih dari 2) dari 2 sektor ekonomi lainnya maupun dari sektor ekonomi unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Proporsi sektor ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun dari 2,03 tahun 1995 naik menjadi 2,10 tahun 2004. Selain sektor pertanian, 2 sektor lain yang menjadi unggulan adalah sektor bangunan serta pengangkutan dan komunikasi.

Tingkat Partisipasi Perempuan pada Sektor Ekonomi Unggulan

Masalah ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja perempuan di sektor

perekonomian merupakan suatu hal yang sering dibicarakan, terutama dalam kerangka pembangunan yang berperspektif gender. Ketidakadilan gender lebih tercermin pada dunia kerja. Terdapat dua indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi penduduk di bidang ketenagakerjaan. *Pertama*, dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (perbandingan antara banyaknya angkatan kerja dengan total penduduk usia kerja) dan *kedua* adalah dengan melihat jumlah pengangguran terbuka (perbandingan antara jumlah penduduk yang mencari kerja dengan banyaknya angkatan kerja). TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan yang bekerja, terutama pada sektor ekonomi unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tingkat partisipasi perempuan di bidang ketenagakerjaan bervariasi untuk setiap daerah di Provinsi D. I. Yogyakarta, demikian juga penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi. Dari 6 sektor ekonomi yang diunggulkan di Kota Yogyakarta, sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah sektor jasa, setelah itu sektor perdagangan, hotel, dan restoran; kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta terakhir adalah sektor listrik, gas, dan air bersih. Tingkat partisipasi perempuan di Kota Yogyakarta dapat dikatakan masih rendah karena dari 9 sektor ekonomi yang ada (termasuk sektor ekonomi unggulan), hanya terdapat satu sektor perekonomian saja yang tingkat partisipasinya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki, yaitu pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (lihat Tabel 2). Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta, tetapi juga terjadi pada semua daerah di Provinsi D. I. Yogyakarta. Sektor perdagangan merupakan sektor yang mudah dimasuki oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin maupun jenjang pendidikan. Di samping itu, sektor perdagangan menjadi pilihan kaum wanita karena lebih mudah dalam membagi waktu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pedagang. Faktor lokasi juga tidak menjadi

Tabel 2
Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Lapangan Usaha	Kabupaten/Kota																			
	Kota Yogyakarta				Kabupaten Sleman				Kabupaten Kulon Progo				Kabupaten Bantul				Kabupaten Gunung Kidul			
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan	
	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004
Pertanian	2,41	1,51	0,81	0,85	30,03	30,17	28,04	29,33	60,25	63,01	56,43	58,24	39,8	29,37	32,64	27,84	66,7	61,6	82,62	78,5
Pertambangan dan galian	0,22	0,38	0,54	0,59	1,17	0,2	0,84	0,61	2,19	1,61	1,73	0,37	0,72	1,91	0,42	0,15	1,08	1,73	0,23	0,12
Industri pengolahan	13,14	6,56	10,3	4,06	10,65	10,66	19,81	14,97	4,92	5,66	14,74	10,84	12,1	15,97	20,31	23,23	4,26	6,18	2,45	3,49
Listrik, gas, dan air bersih	1,24	1,45	0,27	0,37	0,83	0,93	0,27	0,01	0,27	0,32	0,17	0,18	1,2	0,16	0,62	0,09	0,32	0,13	0,11	0,04
Bangunan	4,38	1,97	1,36	1,91	15,73	12,55	0,5	0,61	11,46	7,68	1,21	0,55	10,5	13,74	0,72	0,51	9,25	8,28	0,08	0,44
Perdagangan, hotel, dan restoran	26,93	22,92	48,24	35,44	13,11	13,16	29,31	29,09	7,38	4,04	17,49	18,03	13,2	12,21	30,8	29,91	6,68	9,76	9,76	11,2
Pengangkutan dan komunikasi	10,29	3,98	0,81	2,06	6,03	4,91	0,71	0,25	2,59	2,7	0,27	0,24	6,6	7,3	0,33	0,4	3,23	3,21	0,22	1,73
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	2,63	3,79	1,08	2,54	1,56	1,08	0,81	1,11	0,27	0,4	0,5	0,59	0,51	2,08	0,63	0,2	0,47	0,37	0,15	0,43
Jasa-jasa	38,76	53,13	36,59	52,18	20,89	26,38	19,71	24,03	10,66	14,57	7,46	11,78	15,4	16,26	13,51	17,91	8,05	8,8	4,37	5,95

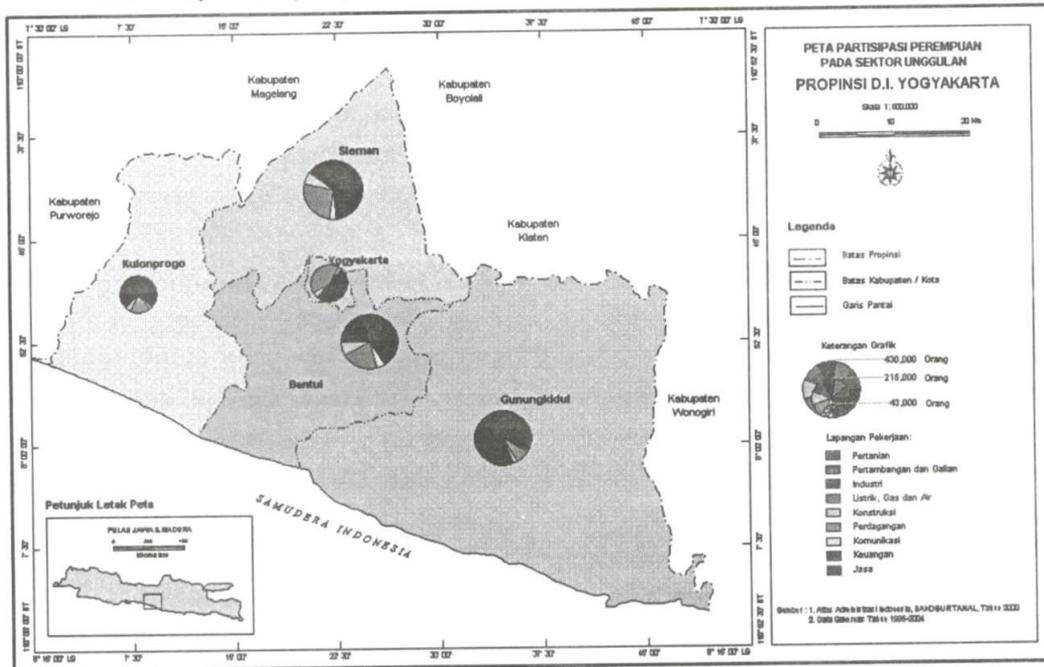
penghalang dalam melakukan jenis pekerjaan ini. Pada Tabel 2, secara umum dapat diketahui pada sektor ekonomi unggulan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja penduduk perempuan, kecuali untuk sektor perdagangan, yaitu dari 48,24 persen turun menjadi 35,44 persen tahun 2004. Demikian halnya untuk sektor ekonomi yang tidak diunggulkan juga terjadi peningkatan partisipasi penduduk perempuan, kecuali pada sektor industri pengolahan turun cukup tinggi dari 10,30 persen menjadi 4,06 persen. Pada penduduk laki-laki walaupun tingkat partisipasinya lebih tinggi untuk setiap sektor perekonomian dibandingkan dengan penduduk perempuan, tingkat partisipasinya cenderung menurun untuk semua sektor perekonomian.

Di Kabupaten Sleman jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan paling banyak terserap di sektor pertanian, sedangkan yang terendah adalah pada sektor listrik, gas, dan air bersih. Tingkat partisipasi perempuan pada sektor ekonomi unggulan sektor pertanian adalah yang paling tinggi, yaitu 28,04 persen tahun 1995 naik menjadi 29,33 persen tahun 2004. Sebagai kategori sektor perekonomian primer, sektor pertanian tidak memerlukan keterampilan dan pendidikan khusus. Di samping itu, masuknya

perempuan di sektor ini karena biasanya suami atau kepala keluarga bekerja di sektor pertanian sehingga secara langsung maupun tidak langsung perempuan ikut bekerja di pertanian. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga menyerap tenaga kerja perempuan cukup banyak. Pada sektor jasa terjadi peningkatan cukup signifikan, yaitu dari 19,71 persen menjadi 24,03 tahun 2004, sedangkan yang mengalami penurunan adalah sektor industri pengolahan dari 19,81 persen menjadi 14,97 persen, selain pada sektor pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan dengan penurunan kurang dari 1 persen. Seperti halnya yang terjadi pada tingkat partisipasi di Kota Yogyakarta, demikian juga pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor bangunan juga terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan partisipasi perempuan di pasar kerja terus mengalami peningkatan. Jumlah perempuan di Kabupaten Sleman yang bekerja di sektor publik terutama sektor perekonomian sekunder dan tersier cukup banyak.

Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo adalah kedua tertinggi setelah Kabupaten Gunung Kidul. Di Kabupaten Kulon Progo sektor pertanian

Gambar 2
Peta Partisipasi Perempuan pada Sektor Ekonomi Unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



berkontribusi yang cukup besar terhadap masalah ketenagakerjaan karena lebih dari 50 persen penduduk terserap di sektor ini. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan penyerapan kesempatan kerja di sektor pertanian, baik pada tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Pada 1995 terdapat 56,43 persen tenaga kerja perempuan yang terserap naik menjadi 58,24 persen tahun 2004. Penyerapan tenaga kerja perempuan pada sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan peningkatan, kecuali pada sektor industri pengolahan. Untuk sektor industri pengolahan ini, tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran; penyerapan tenaga kerja perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dan menunjukkan peningkatan, yaitu dari 17,49 persen menjadi 18,03 persen. Sektor jasa juga menunjukkan peningkatan penyerapan, yaitu dari 7,46 persen menjadi 11,78 persen tahun 2004. Sektor-sektor ekonomi yang tidak menjadi unggulan menunjukkan penyerapan tenaga kerja perempuan juga lebih sedikit.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang bervariasi antarsektor ekonomi. Sebagai

sektor ekonomi unggulan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran; jumlah tenaga kerja perempuan yang terserap cukup banyak, yaitu sekitar 30,80 persen pada tahun 1995 hampir sama dengan sektor pertanian (32,64 persen). Walaupun terjadi penurunan sekitar 1 persen, tingkat partisipasi sektor ini melebihi sektor pertanian karena tahun 2004, tingkat partisipasi perempuan menurun sekitar 5 persen menjadi 25,84 persen. Selain sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor yang tingkat penyerapan tenaga kerja perempuannya lebih tinggi daripada laki-laki adalah sektor industri pengolahan dan jasa-jasa, sedangkan sektor bangunan merupakan sektor ekonomi unggulan yang paling rendah menyerap tenaga kerja perempuan (sekitar 0,6 persen).

Hampir semua jumlah tenaga kerja perempuan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul terserap di sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja perempuan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki walaupun terjadi penurunan penyerapan dari 82,62 persen menjadi 78,51 persen. Penyerapan tenaga kerja perempuan di dua sektor ekonomi lain yang menjadi unggulan, yaitu sektor bangunan kurang dari 1 persen, sedangkan untuk sektor pengangkutan dan

komunikasi, tingkat penyerapan tenaga kerja perempuannya 0,22 persen naik menjadi 1,73 persen. Sektor ekonomi lain (yang tidak menjadi unggulan) yang menyerap cukup banyak tenaga kerja perempuan adalah pada sektor industri pengolahan; perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa.

Produktivitas Tenaga Kerja Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Besar kecilnya jumlah angkatan kerja di suatu daerah pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Secara umum dapat diketahui jumlah angkatan kerja fluktuatif setiap tahunnya. Pada dasarnya semakin tinggi kesempatan kerja dan semakin berkembangnya sektor perekonomian suatu daerah akan membuka peluang kerja sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Produktivitas tenaga kerja perempuan pada sektor ekonomi unggulan di Kota Yogyakarta yang lebih tinggi daripada produktivitas tenaga kerja laki-laki adalah di sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor jasa. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mempunyai tingkat produktivitas paling tinggi (82,01 persen), tetapi tahun 2004 produktivitasnya turun hampir separuhnya menjadi 43,77 persen. Sektor lain

yang mengalami penurunan produktivitas adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, sedangkan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran meningkat cukup signifikan dari 6,80 persen menjadi 28,96 persen tahun 2004.

Keenam sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan nilai produktivitas tenaga kerja perempuan, demikian juga pada sektor ekonomi yang tidak menjadi unggulan. Jika dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja laki-laki, maka terdapat 4 sektor ekonomi yang lebih tinggi nilai produktivitasnya tahun 1995 dan 2004, yaitu sektor pertanian; listrik, gas, dan air bersih; pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa. Produktivitas sektor pertambangan dan penggalian serta sektor bangunan lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki tahun 1995, sedangkan untuk tahun 2004 jauh lebih rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikatakan secara umum tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan di Kabupaten Sleman tidak jauh berbeda dengan tenaga kerja laki-laki atau bahkan pada sektor-sektor perekonomian tertentu justru jauh lebih tinggi. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor ekonomi unggulan yang tingkat produktivitasnya paling tinggi, yaitu 24,66 persen tahun 1995 naik

Tabel 3
Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Lapangan Usaha	Kabupaten/Kota																			
	Kota Yogyakarta				Kabupaten Sleman				Kabupaten Kulon Progo				Kabupaten Bantul				Kabupaten Gunung Kidul			
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan	
	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004	1995	2004
Pertanian	7,17	32,4	26,29	29,53	3,11	13,18	4,58	16,92	1,62	5,45	2,19	8,05	0,21	10,35	0,43	13,38	1,65	7,58	1,42	6,67
Pertambangan dan galian	2,22	0,97	1,11	1,15	2,82	44,05	5,43	17,85	2,66	0,69	4,27	4,18	7,5	1,06	16,66	2,12	6,97	16,27	38,88	26,42
Industri pengolahan	11,12	44,2	17,55	10,18	9,18	35,99	6,77	31,98	16,11	35,03	6,82	24,97	4,13	17,3	3,2	14,25	10,9	37,73	20,18	60,57
Listrik, gas, dan air bersih	1,38	49,7	80,26	49,9	3,46	20,28	14,67	88,52	4,48	34,92	8,96	53,99	1,84	12,66	4,66	30,31	2,37	58,1	4,65	18,5
Bangunan	27,83	94,1	11,32	7,52	4,61	17,07	9,69	9,41	3,22	7,23	38,7	37,73	4,34	9,92	82,21	65,53	4,6	11,26	11,96	29,89
Perdagangan, hotel, dan restoran	9,84	34,2	6,8	28,96	7,53	36,66	4,62	20,7	7,24	12,74	3,87	3,89	4,68	28,58	2,61	12,96	6,27	30,64	4,57	19,56
Pengangkutan dan komunikasi	20,26	79,7	17,18	9,73	10,55	25,41	23,3	32,2	14,64	46,09	54,6	60,27	0,57	1,21	14,84	73,36	1,32	28,1	16,35	40,1
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	94	23,6	82,01	43,77	47,33	21,46	24,66	26,1	87,23	84,6	4,63	12,86	46,97	16,5	49,28	69,37	36,5	74,16	10,95	26,67
Jasa-jasa	9,33	26,2	12,23	27,87	5	15,44	7,2	21,14	8,56	15,27	15,5	25,77	5,27	14,17	7,83	23,78	8,46	16,55	16,61	58,67

menjadi 26,10 persen tahun 2004 dan yang terendah adalah sektor bangunan dengan nilai produktivitas sebesar 9,69 persen turun menjadi 9,41 persen. Sektor ekonomi lain yang tidak menjadi unggulan, namun memiliki nilai produktivitas tinggi adalah sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi (Tabel 3).

Tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan lebih tinggi untuk semua sektor perekonomian dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki, kecuali pada sektor industri pengolahan; perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Pada sektor ekonomi yang tidak diunggulkan, produktivitas tenaga kerja perempuan justru lebih tinggi, terutama pada sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu 54,56 persen tahun 1995 dan naik menjadi 60,27 persen tahun 2004, selain terjadi juga pada sektor bangunan dan jasa-jasa. Dari 4 sektor ekonomi unggulan, tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan tertinggi adalah pada sektor industri pengolahan, yaitu 24,97 persen tahun 2004, sedangkan yang terendah sektor perdagangan hotel dan restoran.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, di Kabupaten Bantul produktivitas tenaga kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Hanya ada dua sektor yang lebih rendah, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya anggapan bahwa tenaga kerja perempuan memiliki tingkat produktivitas yang rendah tidak terbukti. Kenyataan membuktikan penyerapan tenaga kerja laki-laki dan perempuan dapat masuk di pasar kerja mana pun pada semua sektor perekonomian. Sektor bangunan memiliki nilai produktivitas paling tinggi, yaitu 82,21 persen tahun 1995, tetapi turun menjadi 68,53 persen tahun 2004, yang terendah adalah sektor pertanian, yaitu 0,43 persen tahun 1995 dan naik menjadi 13,38 persen tahun 2004. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan walaupun bukan merupakan sektor ekonomi

unggulan, tingkat produktivitasnya tinggi, yaitu mencapai 69,37 persen pada tahun 2004.

Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki nilai produktivitas paling tinggi (40,10 persen) dan sebagai sektor yang diunggulkan di Kabupaten Gunung Kidul, sedangkan yang terendah adalah sektor pertanian (6,67 persen). Semua sektor perekonomian menunjukkan peningkatan produktivitas kerja perempuan. Hal tersebut menunjukkan hasil kerja tenaga kerja perempuan tidak diragukan lagi. Hasil penelitian menunjukkan dari 9 sektor ekonomi yang ada, hanya 3 sektor ekonomi yang tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki (sektor pertanian; perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan). Walaupun bukan merupakan sektor ekonomi unggulan, beberapa sektor ekonomi memiliki tingkat produktivitas dan tenaga kerja perempuan yang cukup tinggi, misalnya pada sektor industri pengolahan 60,57 persen dan sektor jasa-jasa 58,67 persen.

Elastisitas Kesempatan Kerja Perempuan pada Sektor Ekonomi Unggulan

Elastisitas kesempatan kerja merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan kesempatan kerja akan berpengaruh terhadap pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan perbedaan elastisitas tiap-tiap sektor perekonomian untuk penyerapan tenaga kerja. Sumber daya manusia, teknologi, kondisi sosial ekonomi, dan politik, baik skala lokal maupun nasional akan berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai elastisitas kesempatan kerja. Dalam hal ini elastisitas dapat bernilai positif maupun negatif tergantung pada kondisi daerah setempat.

Elastisitas kesempatan kerja tenaga kerja perempuan pada sektor ekonomi unggulan di Kota Yogyakarta menunjukkan dari 5 sektor, 3 sektor ekonomi mempunyai nilai negatif (sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan dan jasa perusahaan, serta sektor

Tabel 4.
Elastisitas Kesempatan Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Lapangan usaha	Kabupaten/Kota									
	Yogyakarta		Sleman		Kulon Progo		Bantul		Gunung Kidul	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Pertanian	2,36	0,99	0,06	0,54	0,34	0,06	-1,45	0,6	-8,9	7,1
Pertambangan dan galian	-8,23	5,37	6,16	1,44	1,72	3,88	2,38	-1,55	0,39	-0,06
Industri pengolahan	0,09	-1,23	0,02	-0,45	-2,28	1,68	0,71	0,79	-0,03	0,04
Listrik, gas, dan air bersih	-3,95	0,73	0,27	-0,01	-1,16	0,01	-3,65	-0,3	-0,36	-0,09
Bangunan	0,73	0,9	1,3	-0,04	1,06	0,17	-0,61	0,09	-1,18	-0,04
Perdagangan, hotel, dan restoran	0,87	-0,2	0,01	-0,05	0,42	-0,01	-1,05	-1,23	-0,06	0,03
Pengangkutan dan komunikasi	0,14	0,28	0,22	0,09	0,04	0,05	-0,52	0,05	0,62	0,13
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	-0,01	-0,03	0,25	-0,15	0,1	0,9	8,82	-3,24	-0,05	0,02
Jasa-jasa	-1,84	-4,45	6,73	5,22	-4,34	-4,19	0,2	0,44	0,55	-0,23

jasa-jasa). Jika terjadi peningkatan 1 persen pendapatan daerah (PDRB), maka justru akan terjadi pengurangan kesempatan kerja perempuan sebesar angka elastisitas pada sektor tersebut. Sektor listrik, gas, dan air bersih memiliki angka elastisitas yang paling tinggi, yaitu 0,73, yang berarti jika terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar 1 persen akan tercipta kesempatan kerja sebesar 0,73 persen. Sektor pertambangan dan galian yang bukan unggulan justru memiliki nilai elastisitas yang paling tinggi, yaitu 5,37 persen. Jika dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki dapat dikatakan nilai elastisitasnya lebih rendah, kecuali pada sektor pertambangan dan galian yang nilai elastisitas tenaga kerja laki-lakinya adalah -8,23.

Terdapat 2 sektor ekonomi unggulan yang memiliki elastisitas positif pada tenaga kerja perempuan di Kabupaten Sleman, yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Sedangkan yang 4 sektor lainnya bernilai negatif yang berarti dengan adanya peningkatan pendapatan 1 persen akan terjadi penurunan kesempatan kerja (lihat Tabel 4). Sektor jasa memiliki elastisitas paling tinggi (5,22) dan sektor industri pengolahan paling rendah (-5,45).

Berbeda dengan elastisitas kesempatan kerja perempuan, untuk tenaga kerja laki-laki di semua sektor ekonomi nilainya positif dan terbesar adalah sektor jasa-jasa (6,73) dan terendah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (0,01). Di Kabupaten Kulon Progo sektor jasa yang merupakan sektor ekonomi unggulan yang memiliki elastisitas negatif (-4,19) untuk tenaga kerja perempuan, demikian juga untuk tenaga kerja laki-laki (-4,34). Sektor ekonomi unggulan yang memiliki elastisitas paling tinggi adalah sektor industri pengolahan, yaitu 1,68, lebih rendah nilainya daripada sektor pertambangan dan galian (3,88) yang bukan merupakan sektor ekonomi unggulan.

Di Kabupaten Bantul dari 5 sektor ekonomi yang diunggulkan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki nilai elastisitas negatif, yaitu -1,23, sehingga jika terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar 1 persen akan terjadi pengurangan kesempatan kerja perempuan sebesar 1,23 persen. Industri pengolahan merupakan sektor ekonomi yang tingkat elastisitas tenaga kerja perempuan paling tinggi (0,79) sehingga adanya peningkatan pendapatan daerah meningkatkan penyerapan kesempatan kerja sebesar 0,79 persen. Pada

tenaga kerja laki-laki elastisitas tertinggi adalah pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 8,82 yang bukan merupakan sektor ekonomi unggulan. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan, elastisitas kesempatan kerja laki-laki paling rendah, yaitu -1,45.

Berbeda dengan 4 daerah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk Kabupaten Gunung Kidul sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi unggulan memiliki elastisitas kesempatan kerja perempuan tertinggi, yaitu 7,10. Sebaliknya, elastisitas kesempatan kerja tenaga kerja laki-laki bernilai negatif, yaitu -8,90. Pada sektor lain yang menjadi unggulan, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, elastisitas tenaga kerja perempuan sebesar 0,13, sedangkan sektor bangunan bernilai negatif, yaitu sebesar -0,04 (Tabel 4).

Penutup

Hasil analisis LQ menunjukkan sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sama untuk setiap daerah. Dari data *time series* 1995-2004 melalui model LQ di Kota Yogyakarta yang menjadi unggulan adalah sektor listrik, gas, dan air bersih; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Terdapat 6 sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Sleman, yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Pada Kabupaten Kulon Progo terdapat 4 sektor, yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan; perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Seperti halnya di Kota Yogyakarta, di Kabupaten Bantul terdapat 5 sektor ekonomi yang unggul, yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor jasa-jasa. Jumlah sektor ekonomi unggulan yang paling rendah di Kabupaten Gunung Kidul (hanya memiliki 3 sektor), meliputi sektor pertanian, bangunan, dan sektor pengangkutan komunikasi.

Tingkat partisipasi perempuan pada sektor ekonomi unggulan di 3 daerah Provinsi D. I. Yogyakarta, yaitu di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul; menunjukkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki penyerapan tenaga kerja perempuan paling tinggi. Di Kota Yogyakarta sebesar 35,44 persen, kemudian Kabupaten Bantul 29,91 persen dan di Kabupaten Sleman 29,09 persen. Sektor pertambangan dan galian serta sektor listrik gas dan air bersih memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan yang paling rendah (kurang dari 1 persen). Demikian juga untuk partisipasi tenaga kerja laki-laki pada sektor tersebut penyerapannya paling rendah di antara sektor-sektor ekonomi yang lain. Di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul tingkat partisipasi perempuan paling tinggi adalah di sektor pertanian, yang lebih dari 50 persen. Tingkat partisipasi perempuan di sektor pertanian di Kabupaten Gunung Kidul adalah yang paling tinggi (78,51 persen) dibandingkan dengan tingkat partisipasi perempuan pada sektor ekonomi lain yang menjadi unggulan di Provinsi D. I. Yogyakarta. Di Kabupaten Kulon Progo tingkat partisipasi perempuan di sektor pertanian lebih rendah, yaitu sebesar 58,24 persen.

Kondisi yang berbeda terlihat pada tingkat produktivitas kerja perempuan di setiap sektor ekonomi unggulan dibandingkan dengan tingkat partisipasinya. Sektor listrik, gas, dan air bersih yang memiliki partisipasi paling rendah di Kota Yogyakarta dengan tingkat produktivitas kerjanya paling tinggi (49,71 persen), sedangkan pada sektor pengangkutan dan komunikasi paling rendah (9,73 persen). Di Kabupaten Sleman tingkat produktivitas kerja perempuan paling tinggi adalah di sektor industri pengolahan (31,98 persen) dan terendah di sektor bangunan (9,41 persen). Sektor jasa-jasa memiliki produktivitas kerja perempuan paling tinggi (25,77 persen) di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan di Kabupaten Bantul yang tertinggi adalah sektor bangunan (68,53 persen). Sektor pertanian memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan paling tinggi, tetapi justru paling rendah tingkat produktivitasnya (6,67 persen).

Saran

Tingkat partisipasi perempuan pada semua sektor ekonomi tidak hanya pada sektor ekonomi yang diunggulkan sehingga akan terjadi keseimbangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilakukan, salah satunya, dengan adanya perluasan kesempatan kerja pada semua sektor ekonomi pada semua daerah di Provinsi D. I. Yogyakarta. Program pelatihan dan pemberdayaan perempuan pada semua sektor perekonomian perlu dilakukan agar produktivitas tenaga kerja perempuan meningkat.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2002. *Statistik Indonesia*. Jakarta.
- Budiyanto. 2001. "Pengembangan bidang ketenagakerjaan di kawasan Indonesia Timur", *Jurnal Ilmiah Volume 9*. UNISRI. Palembang.
- Dwiyanto, Agus dan Muhadjir Darwin. 1996. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ferree Marx Myra. 2003. *Analyzing Gender: She Works Hard for a Living, Gender and Class on the Job*. Beverly Hills, London: Sage Publication.
- Harini, Rika, Sri Rum Giyarsih dan Sri Rahayu Budiani. 2004. "Analisis sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Majalah Geografi Indonesia*, 19(1): 1-20.
- Haris, Abdul. 1997. "Mobilitas angkatan kerja wanita Indonesia ke luar negeri", dalam Irwan Abdullah, ed. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 176-195.
- Harsiwi, Agung. 2004. "Produktivitas kerja dan kesempatan aktualisasi diri dosen wanita", *Jurnal Justisia Ex Pax Edisi Lustrum 2001*. UAJY Yogyakarta.
- Magar, Veronica. 2003. "Empowerment approaches to gender-based violence: women's courts in Delhi Slums", *Women's Studies International Forum*, 26(6): 509-523.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Opong, Cristine & Katherine. 1997. *Seven Role of Women: Impact of Education, Migration, and Employment on Ghanaian Mothers*. Geneva: ILO.
- Simanjuntak, Pajaman. 1995. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
- Suratiyah, Ken. 1997. "Pengorbanan wanita pekerja industri", dalam Irwan Abdullah, ed. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susantiono. 2003. *Gender, Work, and World Capitalism: Third World Women's Role in Development*. Beverly Hills, London: Sage Publication.
- Widiyati, Yati. 1996. "Menyingkap aktualisasi wanita", *Buletin Bina Swadaya*, 4(7): 6-7 & 10-13.